

ABSTRAK

Reza Meilanda Lesmana. 2021, *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP ATAS ASAS ULTIMUM REMIDIUM (Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Baku Mutu Air Limbah Pada Daerah Aliran Sungai Citarum).*

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi kebijakan hukum pidana dalam penindakan dan pertanggungjawaban pidana pencemaran mutu baku air Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi. Khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup. Penegakan hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia dan harta benda. Ketika pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan jiwa manusia, maka perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan moral dan layak untuk dikenakan sanksi pidana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan hukum pidana lingkungan hidup atas asas ultimum remedium dalam penegakan hukum pidana, sanksi pidana dan penegakan hukum tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan terhadap prinsip umum hukum pidana pada Daerah Aliran Sungai Citarum.

Teori dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori, yaitu : Teori Negara Kesejahteraan sebagai Grand Theory, Teori Hukum Pembangunan sebagai Midle Theory dan Teori Kebijakan Hukum Pidana sebagai Aplicative Theory.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah mengkaji atau menganalisis secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.

Hasil penelitian ini adalah 1) Kebijakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini belum mencapai tujuan. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 menjadikan ultimum remedium sebagai langkah terakhir dalam penegakan hukumnya. Hal ini tidak akan menjadikan efek jera terhadap pelaku pencemaran lingkungan di wilayah DAS Citarum khususnya terhadap pelanggaran baku mutu air limbah yang kenyataannya pencemaran sudah terjadi namun belum bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. 2) Sanksi dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 menganut Asas Ultimum Remedium, yaitu sanksi administratif yang didahulukan ketimbang Sanksi pidana terhadap pelaku berikut badan usahanya yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup pada Daerah Aliran Sungai Citarum, sepatutnya sanksi pidana yang diberikan terhadap perbuatan tersebut tidak mengenakan sanksi minimal, Oleh karena itu harus sanksi yang maksimal supaya pelaku pencemaran akibat dari pelanggaran baku mutu air limbah tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya. 3) Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini khususnya pencemaran terhadap baku mutu air limbah yang dialirkan ke sungai Citarum belum efektif. Sehingga diperlukan upaya semua pihak terutama Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih tegas memberikan sanksi administratif terhadap pelaku pencemaran yang melebihi baku mutu apabila setelah diberikan sanksi administratif masih melakukan pencemaran maka kewajiban aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana yang tegas terhadap pelakunya.

ABSTRACT

Reza Meilanda Lesmana. 2021, *ENVIRONMENTAL CRIMINAL POLICY ON THE ULTIMUM REMIDIUM BASIS (Analysis of Law Enforcement Against the Crime of Wastewater Quality Standard Pollution in the Citarum River Watershed)*.

The background of this thesis writing is the criminal law policy in prosecution and criminal responsibility for contamination of the water quality standard of the Citarum Watershed (DAS), which does not have a significant effect on law enforcement against corporate crime. Especially against criminal acts committed by corporations in the environmental sector. Penal law enforcement basically aims to protect the lives and honor of humans and property. When environmental pollution and destruction has had a negative impact on human life and soul, then the act must be viewed as an act that is against morals and deserves to be subject to criminal sanctions.

The purpose of this study is to analyze the environmental criminal law policy on the principle of ultimum remedium in criminal law enforcement, criminal sanctions and criminal law enforcement against perpetrators of environmental pollution crime against the general principles of criminal law in the Citarum River Basin.

The theory in this study, the researchers used several theories, namely: Welfare State Theory as Grand Theory, Development Law Theory as Middle Theory and Criminal Law Policy Theory as Applicative Theory.

The method used in this research is normative juridical method. The normative juridical method is to study or analyze systematically the facts or characteristics of a particular population or particular field factually and accurately.

The results of this study are 1) The current criminal law policy in the environmental sector has not achieved its objectives. Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 makes ultimum remedium the final step in law enforcement. This will not have a deterrent effect on perpetrators of environmental pollution in the Citarum watershed area, especially against violations of quality standards for waste, which in fact has occurred but cannot be held responsible for the crime. 2) Sanctions in Republic of Indonesia Law Number 32 Year 2009 adhere to the Ultimum Remedium Principle, namely administrative sanctions that take precedence over criminal sanctions against the perpetrators and their business entities who are proven to have polluted the environment in the Citarum River Basin. does not impose minimal sanctions, therefore maximum sanctions must be given so that the perpetrators of pollution due to violations of the waste water quality standards do not repeat their actions. 3) The current enforcement of criminal law in the environmental sector, especially the pollution of the quality standards of waste water discharged into the Citarum river, is not yet effective. So that it takes the efforts of all parties, especially the Environmental Service, to be more firm in imposing administrative sanctions against the perpetrators of pollution that exceed the quality standard if after being given administrative

sanctions they still carry out pollution, it is the obligation of law enforcement officials to provide strict criminal sanctions against the perpetrators.

Keywords: Analysis, Policy, Citarum Watershed

